

Propaganda Khilafah HTI di Indonesia

Ahmad Khotim Muzakka

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

muzakkaahmad@gmail.com

Abstract: *This article presents contemporary issues related to khilafah discourse in online media, <http://hizbut-tahrir.or.id>. The site is the official page of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Researchers focus on contemporary issues discussed in related pages. This is done to find out what the theme of their discussion. The purpose of this study is to describe the construction of khilafah discourse, especially in contemporary issues. Another goal is to know the character of the khilafah discourse used. The results of this study indicate that there are three main issues in hizbut-tahrir.or.id. First, about the dangers of neoliberalism and neoimperialism. Second, on terrorism and violence. Third, on environmental issues. The character of khilafah discourse. First, use history as a religious legitimacy. Second, the prominent display of Islamic identity.*

Keywords: *caliphate, religion, hti, online media, contemporary issues*

Abstrak: *Penelitian ini menyajikan isu-isu kontemporer terkait dengan diskursus khilafah di media online, <http://hizbut-tahrir.or.id>. Situs tersebut merupakan halaman resmi milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Peneliti menfokuskan pada isu-isu kontemporer yang dibahas dalam halaman terkait. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tema apa saja yang menjadi pembahasan mereka. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan konstruksi diskursus khilafah, khususnya dalam isu-isu kontemporer. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui karakter diskursus khilafah yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga isu utama di hizbut-tahrir.or.id. Pertama, mengenai bahayanya neoliberalisme dan neoimperialisme. Kedua, mengenai terorisme dan kekerasan. Ketiga, tentang isu lingkungan hidup. Karakter diskursus khilafah. Pertama, menggunakan sejarah sebagai legitimasi keagamaan. Kedua, penonjolan identitas keislaman yang mencolok.*

Kata Kunci: *khilafah, agama, hti, media online, isu kontemporer*

PENDAHULUAN

Diskursus gerakan politik Islam telah lama menjadi perdebatan oleh sejumlah cendekiawan. Para sarjana menjabarkan isu ini dengan sangat serius dalam berbagai bentuk kajian seperti halnya dari segi sisi historis, teologi, politik, dan kultur (Dabashi, 1989; Fuller & Lesser, 1995; Hefner, 2005; Hodgson, 2002; Jindan, 1979; Springer, Regens, & Edger, 2009; Springer et al., 2009; Wahid (ed), 2009).

Syaifuddin Jurdi (2008, 343-348) menyatakan bahwa dalam sejarah Indonesia, terdapat banyak macam pergerakan islam yang bermunculan di nusantara. Setelah keruntuhan rezim Suharto, gerakan Islam yang sempat dibungkam selama beberapa dekade mengemuka dan berpretensi memperlihatkan diri dengan berbagai macam cara. Untuk sekadar menyebut macam-macam pergerakan tersebut adalah, antara lain, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Laskar Jihad (LK), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Bangkitnya gerakan Islam pasca orde baru tidak bisa dilepaskan dari sejarah politik bangsa yang, menurut Syaifuddin Jurdi, telah melemahkan isu dan wacana tentang Islam. Hegemoni politik tersebut, setidaknya, berlaku sejak Demokrasi Terpimpin (1959) yang kemudian diteruskan oleh rezim berkuasa pada 1967. Imbasnya adalah terjadi politik hegemoni negara terhadap Islam. Meskipun, pada dekade 1970-an diskursus intelektual mengenai Islam dan negara kembali menghangat, akan tetapi tidak sesemarak pada dekade-dekade sebelumnya (Jurdi, 2006).

Sebagai akibat dari sikap represif yang ditujukan kepada umat Islam selama beberapa dekade tersebut menimbulkan euforia pada umat Islam ketika kekuasaan Soeharto runtuh pada 1998. Runtuhnya kekuasaan Soeharto pada 1998 membuka kesempatan bagi berkembangnya gerakan Islam di Indonesia (Muhtadi, 2009). Menurut Moch Nur Ichwan (2014: 101) tumbangannya rezim Soeharto membuka peluang transformasi politik yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.

Hizbut at-Tahrir—yang merupakan sumber dari lahirnya HTI—sangat serius memperjuangkan gagasan khilafah. Bagi organisasi transnasional ini, khilafah disebut sebagai sistem politik yang telah pernah ada sejak era kepemimpinan Nabi Muhammad sampai pada keruntuhannya pada tahun 1924. Atas klaim sepihak ini, Ainur Rofiq mengajukan kritik sejarah yang dapat harus dipertimbangkan.

Dalam menyebarkan gagasannya, HTI menggunakan berbagai media. Salah satunya adalah dengan menggunakan laman hizbut-tahrir.or.id sebagai media penyebar ideologi dan gagasan mereka. Sebagai organisasi yang memiliki konsentrasi dalam diskursus khilafah, HTI sangat diperhitungkan. Deklarasi khilafah yang dikumandangkan oleh Abu Bakar al-Baghdady tidak mendapatkan respons positif dari HTI. Sebagaimana dijelaskan di

pembukaan tulisan ini, HTI menolak klaim kekhalifahan yang diproklamkan oleh Abu Bakar al-Baghdady. Namun, di saat yang bersamaan pula, HTI masih terus mempropagandakan gagasan khilafah di sejumlah penerbitannya.

Yeni Ratnayuningsih dalam *Islam, Media, and Social Responcibility in the Muslim World* (2013: 583) menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir media internet memerankan fungsi signifikan dalam lapisan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan menjamurnya berbagai budaya populer yang mempengaruhi budaya anak muda, yang mana termasuk di dalamnya adalah di dunia Islam. Diskursus dunia Islam pun bermunculan dari beragam variasi pemikiran.

Di Indonesia, pengguna internet mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika ([http://kominfo/go.id](http://kominfo.go.id)), pengguna internet di Indonesia mencapai angka 82 juta pengguna. Dengan pengguna sebanyak itu menegaskan pengaruh kuat atas informasi yang terdapat di internet.

Seturut dengan itu, menurut Imamah (2014: 16) pada tahun 2008 banyak bermunculan media Islam, termasuk media Islam militan. Disebutkan bahwa dalam catatan Alexa Global (laman pemeringkat situs) terdapat sepuluh laman terpopuler dalam lingkup media Islam Indonesia yang dihitung dalam pemeringkatan global. Alexa merupakan laman yang mengalisis lalu-lintas dan menyediakan lalu-lintas dan memperingkat status laman. Ditemukan oleh perusahaan independen pada 1996, alexa.com akhirnya diakuisisi oleh Amazon pada 1999. Alexa mengalisis lalu-lintas laman sesuai dengan kunjungan yang didapatkan dari laman tertentu (wikipedia.org).

Dibandingkan dengan media-media Islam lain yang tidak secara tegas mendeklarasikan diri sebagai penyokong utama gagasan khilafah, pemilihan hizbut-tahrir.or.id menjadi urgen mengingat laman ini merupakan laman resmi dari organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. hizbut-tahrir.or.id merupakan portal yang menyediakan beragam tulisan yang mempropagandakan berdirinya khilafah. hizbut-tahrir.or.id mendapatkan peringkat ke-1845 dalam pemeringkatan se-Indonesia berdasarkan pemeringkatan sesuai data yang peneliti rujuk dari alexa.com. Dalam skala global, hizbut-tahrir.or.id menempati posisi 126.987 dan memiliki site-link sebanyak 551 buah.

Kerangka Teori

Untuk memahami menganalisa lebih lanjut, perlu dijelaskan pengertian dan batasan mengenai imajinasi khilafah. untuk mendukung temuan atas konstruksi wacana yang dibangun terkait khilafah di laman hizbut-tahrir.or.id.

Dalam Islam dikenal terminologi ummah yang menjadi perbincangan dan sekaligus perdebatan banyak pemikir. Terminologi ini sangat bersinggungan dengan riwayat masa

lalu Islam. Menurut Ejaz Akram (2007: 383) kata ummah disebut sebanyak 62 kali di dalam al-Qur'an dengan intensi komunitas agama. Ternyata, di dalam al-Qur'an, penyebutan kata ummah memiliki perkembangan kronologi mengenai konsep ummah; dari yang semula dipahami sebagai kata umum kemudian digunakan secara khusus untuk agama-agama abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Namun, adakalanya, penggunaan kata ummah juga dikhususkan bagi komunitas Islam, yakni pada masa Nabi Muhammad tinggal di Madinah (Akram, 2007).

Menurut Ajez Akram (2007), dalam Al-Qur'an, kata ummah muncul sebanyak 62 kali dengan intensinya sebagai komunitas keagamaan. Dalam kronologisnya, kata ummah juga digunakan oleh bangsa Yahudi, Kristen, selanjutnya untuk kaum Islam. Pada saatnya, Al-Qur'an menggunakan kata ummah yang hanya ditujukan bagi komunitas kecil kaum Islam. Terkhusus lagi pada periode kehidupan Nabi Muhammad di Madinah, sehingga intensi penggunaan kata ummah terkesan eksklusif.

Menurut Elizabeth Pooley (2015: 32), konsep ummah muncul dari gagasan bahwa muslim merupakan satu kelompok global yang terkoneksi (*globally connected group*). Satu ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan atas gagasan tersebut lahir dari ayat 3: 110 yang berbunyi: *"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang makruf, dan mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik."*

Dalam perjalanannya, terjadi evolusi makna kata ummah yang tidak hanya tertuju pada umat Islam. Ajez Akram mencatat (2007: 386) kata ummah dalam piagam Madinah menyertakan umat Yahudi dan yang lainnya di mana mereka hidup secara harmonis bersama dengan umat Islam. Sama dengan argumentasi Ajez Akram, Ali Bulac berargumentasi bahwa piagam madinah merupakan suatu konsensus yang terjadi antara Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik yang memberikan otoritas kepada kaum muslim menguasai kota Arab, namun di saat yang bersamaan juga melindungi hak-hak mereka (Pohan, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, terma *daulah/state* (negara), baik dalam al-Qur'an dan hadis, tidak disebutkan secara eskpilisit. Di dalamnya keduanya, hanya disebutkan prinsip-prinsip yang secara implisit menegaskan peran penting negara, meliputi antara lain keadilan, persaudaraan, persamaan, persatuan, solidaritas, kepatuhan, dan lain sebagainya (Jindan, 1979: 76).

Secara kebahasaan, *khilafah* bermakna perwakilan. Istilah *khilafah* derivasi dari kata khalifah. Sedangkan khalifah berarti wakil, pengganti, atau mandataris. Dalam pengertian yang lebih luas, *khilafah* adalah “pihak yang disertai wewenang dan tanggung jawab untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang diwakili (Mas’udi, 2014: 99). Pada konteks dengan doktrin keislaman, kata tersebut merujuk pada relasi manusia sebagai *kbhalifah* (penerima mandat) dengan Tuhan sebagai pemberi mandat.

Sedangkan terminologi *ummah* yang menjadi perbincangan dan sekaligus perdebatan banyak pemikir. Terminologi ini sangat bersinggungan dengan riwayat masa lalu Islam. Menurut Ejaz Akram (2007: 383) kata *ummah* disebut sebanyak 62 kali di dalam al-Qur’an dengan intensi komunitas agama. Ternyata, di dalam al-Qur’an, penyebutan kata *ummah* memiliki perkembangan kronologi mengenai konsep *ummah*; dari yang semula dipahami sebagai kata umum kemudian digunakan secara khusus untuk agama-agama abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Namun, adakalanya, penggunaan kata *ummah* juga dikhususkan bagi komunitas Islam, yakni pada masa Nabi Muhammad tinggal di Madinah (Akram, 2007).

Secara rinci, di samping dipergunakan untuk komunitas Islam, penggunaan kata *ummah* dalam al-Qur’an dipakai dalam banyak hal. Kata tersebut juga digunakan untuk menyebut nilai tradisional atau sistem kepercayaan (al-Qur’an 43:22, 23); ditujukan untuk menyebut suku (al-Qur’an 7:164; 28:32); menunjuk suatu masa atau terma tertentu (al-Qur’an 11:8; 12:45); menunjukkan keteladanan (al-Qur’an 16:20); dan juga untuk menyebut jenis binatang (al-Qur’an 6:38) (Hossain, 2012: 301).

Dilihat dari segi etimologi, menurut Mandaville, terma *ummah* mengandung ambiguitas. Menurutnya, istilah ini bisa dilacak dari berbagai versi pendapat. Ada yang mengatakan bahwa istilah ini memiliki kaitan dengan bahasa Arab *umm*, yang berarti “ibu”. Namun, kata ini juga lekat dengan bahasa orang Yahudi, yang berarti komunitas. Selain itu, kata tersebut juga diperkirakan berasal dari Sumeria. Terlepas dari mana kata itu berasal, hal yang pasti adalah terminologi *ummah*, sekarang ini, dinisbatkan sebagai konsep utama atas komunitas global muslim (Mandaville, 2001: 71). Terma *ummah* menandakan sebuah komunitas yang memiliki ritus agama tertentu, percaya kepada Tuhan yang sama dan Nabi-Nya, dan mengharapkan berdirinya khilafah (Cenker, 2015: 156). Sangat disayangkan Mandaville tidak memerinci kata-kata yang dimaksud sebagai asal mula kata *ummah* dalam berbagai versinya.

Sejarah Singkat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir (HT) merupakan satu fenomena dalam pergerakan organisasi kemasyarakatan masyarakat dunia. Organisasi transnasional ini didirikan untuk menyalurkan pandangan politik pendirinya mengenai ideologi Islam.

Lahir pada tahun 1909, Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1977) memiliki nama lengkap Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mushtofa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad Itln Nashiruddin an-Nabhani. An-Nabhani lahir dari keluarga terpandang di desa Ijzim, Haifa. Persinggungannya dengan persoalan politik dimulai ketika masih berusia muda. Ia diajak oleh kakeknya untuk menghadiri diskusi-diskusi politik (Jamilah, 2015: 3-4). Pengaruh besar dari kakeknya, yaitu Asy-Syeikh Yusuf, memberikan kesadaran politik (Rodhi, 2008: 60).

Pendirian Hizbut Tahrir merupakan respons Taqiyuddin an-Nabhani atas situasi politik yang terjadi di Timur Tengah pada 1950-an. Meskipun demikian, landasan ideologisnya diambil dari ayat Al-Qur'an Surat Al-Imran: 104, yang berbunyi, "*dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*" (Rijal, 2011: 113).

Pendirian Hizbut Tahrir didasarkan pada kekecewaan an-Nabhani atas perilaku pergerakan Islam yang berpartisipasi dengan sistem sekuler dan menggunakan aksi-aksi kekerasan, yang mana menyebabkan terjadinya represi negara. Secara politis, an-Nabhani menolak reformasi Ikhwanul Muslimin dan militan Islamis. Dia menawarkan satu konsep yang diharapkan dapat menggantikan sistem sekuler menjadi pemerintahan khilafah (Ahnaf, 2011: 2).

Meskipun embrio Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah lama didirikan, akan tetapi kemunculannya di Indonesia berlangsung beberapa dekade setelahnya. Mengenai kedatangan Hizbut Tahrir ke Indonesia, terdapat beberapa versi yang berbeda.

M. Iqbal Ahnaf, contohnya, menyebutkan bahwa meski tidak ada kejelasan mengenai kapan HT muncul di Indonesia, akan tetapi ideologinya pertama kali tampak ketika Taqiyuddin an-Nabhani datang ke Indonesia pada tahun 1972 (Ahnaf, 2006: 6). Berbeda dengan Ahnaf, Syamsul Arifin menjelaskan kedatangan HT ke Indonesia antara 1982-1983, berselang puluhan tahun setelah sebelumnya merangsek ke tempat lain seperti Suriah, Lebanon, Kuwait, dan Irak pada sekitar tahun 1960-an (Arifin, 2005: 121).

Adapun ekspansi HT ke Indonesia terkait dengan dua sosok, pertama, Abdurrahman al-Baghdadi, aktivis keturunan Palestina yang bermigrasi ke Australia pada 1960-an; dan kedua, Abdullah bin Nuh, pimpinan pesantren al-Ghazali di Bogor. Sebagai seorang guru dan pendakwah, Abdullah merasa kecewa dengan organisasi Islam di Indonesia pada akhir 1970-an. Dalam kunjungan ke Sidney untuk mengunjungi anaknya yang sedang belajar, Abdullah bertemu dengan Abdurrahman al-Baghdadi, yang kemudian diundang ke Indonesia untuk memperkenalkan gagasan an-Nabhani di pesantren pimpinannya. Pada perkembangan selanjutnya, pesantren al-Ghazali menjadi pusat pembelajaran gagasan HT. Sistem pengajarannya menggunakan dua metode (1) *halaqah*

(lingkaran studi) dan (2) *daurah* (program pelatihan). Memanfaatkan aktivis kampus, yaitu Lembaga Dakwah Kampus (LDK), HTI menyebarkan gagasannya sehingga masuk ke kampus bergengsi seperti Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan Universitas Indonesia di Jakarta (Muhtadi, 2009: 626-627).

Wacana Kontemporer sebagai Propaganda Khilafah

Analisis wacana berkontribusi untuk memetakan analisis sosial dan analisis kultural dengan menggunakan pemahaman terhadap bahasa yang digunakan. Tujuan utama bahasa adalah menyampaikan informasi (*communicate information*), namun dalam lingkup kehidupan manusia fungsi tersebut naik ke level berikutnya menjadi (i) untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dan identitas sosial; (ii) untuk mendukung pertalian manusia dengan budaya, kelompok sosial, dan institusi (Gee, 2006).

Peneliti memfokuskan pada pembahasan wacana kontemporer yang dipropagandakan di laman *biżbut-tabrir.or.id* sebagai upaya untuk mendiferensiasi dengan penelitian sebelumnya. Pemilahan tema-tema yang diangkat dalam penelitian ini—yakni seputar wacana kontemporer—lebih diniatkan agar mendapatkan pemahaman dan pemaknaan baru terhadap gagasan *khilafah* atau ummah. Wacana kontemporer yang dimaksud di sini adalah hal-hal kekinian yang masih hangat diperbincangkan. Dalam konteks ini, narasi wacana tersebut selalu dihubungkan dengan wacana khilafah/ummah dan perannya. Kontemporer maksudnya adalah wacana kekinian yang terjadi belakangan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008 :805), kata kontemporer berarti “pada waktu atau masa yang sama”; “pada masa kini”.

Dari tema besar wacana kontemporer tentang wacana *ummah* atau khilafah, peneliti mengklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok bagian. Perlu ditegaskan sebelumnya bahwa pemilihan dan pemilihan atas teks-teks yang terpilih didasarkan pada (1) keterkaitan dengan wacana kontemporer dan (2) intesitas pembahasan terhadap topik terkait. Setelah melakukan serangkaian proses pemfilteran, penelitian mendapatkan temuan klasifikasi yang antara lain, mengenai penolakan terhadap neoliberalisme, sikap terhadap terosisme dan kekerasan, dan respons terhadap isu lingkungan. Tiga plot tema tersebut akan menjadi pembahasan berikutnya.

1. Pandangan terhadap Neoliberalisme dan neoimperialisme

Era globalisasi membuka ruang terbuka bagi perkembangan segala bentuk pembaruan gagasan dan aplikasi. Dinamika tersebut jika tidak mendapatkan respons yang sejalan dengan era zaman akan mendapatkan stereotipe buruk. Salah satu wacana penting dalam produksi wacana laman *biżbut-tabrir.or.id* adalah persoalan neoliberalisme di

Indonesia. Neoliberalisme dianggap sebagai momok menakutkan dan dinilai sebagai bentuk penjajahan era baru.

Pembahasan mengenai relasi ekonomi, neoliberalisme, dan ideologi khilafah sangat penting ditegaskan. Hal itu merujuk penjelasan Noorhaidi Hasan yang mengatakan bahwa ideologi memiliki jalinan fungsional dengan faktor-faktor struktural sosial-ekonomi (Hasan, 2012).

Pada tulisan “Cara Khilafah Mengendalikan Harga” (11 Desember 2014) dijelaskan bagaimana mekanisme yang dijalankan Nabi dalam menstabilkan ekonomi ketika terjadi lonjakan harga barang di pasar. Tulisan ini bermula dari argumen yang mengatakan bahwa harga barang ditentukan oleh penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Analoginya adalah jika barang melimpah dan peminat sedikit maka harga akan cenderung turun. Sebaliknya jika barang terbatas dan peminat banyak maka akan berpengaruh terhadap lonjakan harga.

Di tulisan ini juga dijelaskan bahwa ketika terjadi lonjakan harga barang, pemerintah tidak seharusnya mematok harga barang karena akan menyebabkan inflasi. Alasannya adalah karena, menurut Hafidz Abdurrahman, sang penulis, jika pemerintah melakukan pematokan harga maka akan terjadi inflasi.

Yang perlu ditekankan di sini yaitu mengenai konsep penawaran dan permintaan karena hal itu sangat umum. Sehingga ketika sang penulis mengklaim bahwa hal tersebut pernah dipraktikkan nabi dengan menyatakan, “*Ketika zaman Nabi, saat harga barang-barang naik, para sahabat datang kepada Nabi SAW meminta agar harga-barga tersebut dipatok, supaya bisa terjangkau. Tetapi, permintaan tersebut ditolak oleh Nabi, seraya bersabda, “Allahlah yang Dzat Maha pencipta, Menggenggam, Melapangkan rezeki, Memberi rezeki, dan Mematok harga.”* (HR. Ahmad dari Anas).

Apa yang dipaparkan dalam tulisan tersebut ganjil karena hanya berdasarkan satu hadist tersebut sang penulis terlihat terlalu memaksakan argumen untuk menariknya pada wacana negara khilafah. Terlihat tidak adanya sinkronisasi persoalan yang dapat menjelaskan secara detail hubungan antara *supply and demand* dengan urgensi menghadirkan wacana khilafah sebagai solusi persoalan.

Masih dalam bingkai yang sama, peneliti menemukan tiga tulisan yang saling berkait dalam kerangka ekonomi dan neoliberalisme dalam sub-bab ini. Antara lain, “Kebijakan Khilafah terhadap Negara Asing” (Abdurrahman, 6 Mei 2015), “Khilafah dalam Kebijakan Pembangunan Infrastruktur” (Abdurrahman, 25 Mei 2015), dan “Hanya Khilafah yang Mampu Membendung Neoliberalisme dan Imperialisme” (Anonim, 3 Juni 2015).

Ketiga tulisan tersebut secara umum memotret bagaimana peran khilafah dalam mengelola ekonomi terkait hubungannya dengan apa yang disebut dengan “negara asing” dan “neoliberalisme” dan “imperialisme”.

Pada tulisan “Kebijakan Khilafah terhadap Negara Asing” (6-5-2015) memperlihatkan dualisme terhadap badan perusahaan. Dikotomi tersebut terlihat pada pembagian yang mendasarkan identitas kewargaannya sebagai—apa yang disebut dengan—“warga negara Khilafah”. Jika seseorang merupakan warga negara Khilafah maka secara otomatis perusahaan yang dibuat legal. Namun, jika yang membuat adalah non-warga negara Khilafah maka terbilang dalam kategori perusahaan ilegal.

Selain itu, terdapat tiga kategori lagi seputar perusahaan ilegal. Pertama, kafir *barbi fi’lan*. Yang termasuk dalam kategori ini adalah warga negara Amerika, Inggris, Rusia, dan Israel. Warga negara-negara tersebut tidak diperbolehkan mendirikan perusahaan di negara Khilafah. Status larangan tersebut terkait dengan status negara yang dihadap-hadapkan sebagai musuh dalam berperang. Hal tersebut terlihat jelas dari kategori kedua yang menyebutkan bahwa dalam kategori kafir *barbi hukman*, warga negara terkait diperbolehkan mendirikan perusahaan jika di antara negara khilafah dan negara tersebut memiliki kontrak perjanjian. Jika memiliki perjanjian maka kategori kedua tersebut akan di-*upgrade* menjadi level ketiga, kafir *mu’ahad*. Kategori terakhir inilah yang diperbolehkan mendirikan perusahaan di negara khilafah.

Menilik penjelasan di atas, prosedur yang dipaparkan pada umumnya merupakan prosedur yang diterapkan oleh negara-negara dengan konsep modern. Terutama dalam kaitannya dengan kategori pertama dan kedua. Hanya saja, dalam peringkat kategori pertama, pengecualian yang dilakukan terhadap negara semacam Amerika, Inggris, Rusia, dan Israel adalah murni karena negara khilafah menjadikan mereka sebagai *kafir barbi fi’lan*. Dalam artian, mereka adalah negara-negara yang menjadi musuh utama negara khilafah.

Masih dalam lingkup ekonomi negara khilafah, dalam tulisan “Kebijakan Khilafah dalam Membangun Infrastruktur”, (25 Mei 2015), dijelaskan bahwa pilihan atas sistem ekonomi yang salah berimbas pada pengelolaan infrastruktur. Akibat dari sistem ekonomi yang salah mengakibatkan seluruh kekayaan yang dimiliki negara tidak dapat dimaksimalkan. Di tulisan ini kemudian diperlihatkan kemungkinannya apabila negara berdasarkan perekonomian Islam dengan penjelasan, “*Khilafah menerapkan ekonomi Islam secara utuh dan murni. Ini menyangkut kepemilikan (milkiyah), pengelolaan kepemilikan (tasharruf), termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat.*”

Dengan penjelasan tersebut terlihat bagaimana mereka mengonstruksi pemikiran pembaca untuk mengimajinasikan sistem ekonomi khilafah yang lebih prospektif dan akan

menyelesaikan permasalahan ekonomi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah persoalan pembangunan infrastruktur.

Model imajinasi atas kedigdayaan negara khilafah juga tercermin dalam hal menghadapi ideologi yang disebut bertentangan dengan Islam. Dalam tulisan “Hanya Khilafah yang Mampu Membendung Neoliberalisme dan Neoimperialisme” ditegaskan bagaimana dampak kapitalisme yang menyebabkan tumbuhnya neoimperialisme. Di sini digambarkan, neoliberalisme sebagai model penjajahan baru karena muncul dan berkembang dari negara-negara Barat. Secara eksplisit dalam tulisan ini menyebutkan peran Barat dalam menyebarkan neoliberalisme, sebagai berikut:

Neoliberalisme mulai diterapkan bagi publik secara luas di Barat pada tahun 1980-an, yakni pada masa Presiden AS Ronald Reagan (berkuasa 1981-1989) dan masa PM Inggris Margaret Thatcher (berkuasa 1979-1990). Adapun neoimperialisme mulai eksis sejak berakhirnya Perang Dunia II (1939-1945), yaitu ketika negara-negara kafir penjajah dari Barat menyadari tak mungkin lagi mempertahankan penjajahan gaya lamanya di negara-negara jajahannya di Asia dan Afrika. Negara-negara kapitalis itu pun melakukan perubahan cara penjajahan, dari penjajahan fisik melalui kekuatan militer menjadi penjajahan melalui cara-cara non-militer seperti utang luar negeri, proyek pembangunan, pengiriman konsultan ahli, dsb.

Penjelasan tersebut ingin membawa pembaca kepada rekam sejarah bahwa ada kekuatan yang tidak diinginkan. Neoliberalisme dan neoimperialisme digambarkan sebagai paham yang bertentangan dan berhadapan langsung dengan khilafah. Setelah menjelaskan sedikit tentang neoliberalisme dan neoimperialisme di atas, serta menyinggung runtuhnya sosialisme pada 1991 yang tidak mampu melawan neoimperialisme dan neoliberalisme, dinarasikan bahwa saat inilah peran umat Islam, lewat negara Khilafah, mengambil peran setelah pada 1924 kerajaan Ottoman di Turki runtuh. Penekanan terhadap waktu tersebut mengandaikan bahwa negara khilafah bisa terwujud dengan dukungan umat Islam.

2. Tentang isu Terorisme dan Kekerasan

Persoalan lain yang digunakan untuk mendukung gagasan khilafah adalah dengan mewacanakan kemampuan khilafah dalam menanggulangi terorisme. Tulisan berjudul “Cara Khilafah Menanggulangi Terorisme” (9 Januari 2012) menyajikan metode-metode yang dapat digunakan oleh seorang khalifah dalam meredam terorisme.

Sebelum memaparkan cara menanggulangi terorisem, di sana dipaparkan mengenai batasan terorisme itu sendiri. Menurut HTI, yang merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam

usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Dari pengertian tersebut, dikategorikan dua hal, (1) yang menyangkut hak-hak orang lain dan (2) menyangkut stabilitas negara.

Pada bagian pertama disebutkan soal rincian yang termasuk dalam kategori menyangkut hak-hak orang lain yaitu “*tindakan teror, baik secara verbal maupun fisik*”.

Tulisan lain yang mengangkat tema penolakan terhadap kekerasan untuk mengukuhkan gagasan khilafah adalah tulisan berjudul “Khilafah: Ajaran Islam, Bukan Kejahatan), 19 Agustus 2014. Deklarasi khilafah oleh Abu Bakar al-Baghdady menghidupkan kembali diskursus politik islam transnasional di Indonesia. Sejumlah kalangan merasa perlu untuk melakukan ferivikasi terkait klaim deklarasi khilafah yang berbasis di Iraq dan Suriah. Terlebih lagi ketika para mujahidin *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) melakukan berbagai tindakan anarkis terhadap kelompok, golongan, ataupun personal yang tidak sepaham dengan mereka.

Apa yang dipertontonkan oleh kelompok *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) yang bertransformasi menjadi *Islamic State* (IS) menyita perhatian khalayak luas. Kekejian demi kekejian yang dipublikasikan dengan pongah memperlihatkan dan, tentunya, mencoreng citra Islam sebagai agama yang *rahmatan lilalamin* (rahmat bagi seluruh alam).

Hizbut-tahrir.or.id memberikan pernyataan mengenai deklarasi khilafah. Judul tulisan yang dipampang adalah “Khilafah: Ajaran Islam, bukan Kejahatan”. Superstruktur (skema) dari dimulai dari gencarnya pemberitaan mengenai khilafah yang didirikan oleh Abu Bakar al-Baghdady. Munculnya video kekejian ISIS yang menjadi viral di dunia maya merupakan salah satu, yang diklaim, meresahkan publik. Isi tulisan ini ingin menegaskan bahwa khilafah tadi tidak sah, sembari memberikan penegasan bahwa khilafah yang diusung berbeda dengan perjuangan HTI.

Munculnya fenomena *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) yang diproklamirkan oleh Abu Bakar al-Baghdady menimbulkan berbagai tanggapan dari dunia Islam. Banyak kalangan menolak pendirian khilafah tersebut, apalagi dengan banyaknya aksi kekerasan yang ditunjukkan kepada publik.

Detail informasi untuk mendukung pendapat ini, antara lain pada kalimat, “*Isu ISIS dijadikan sebagai kesempatan untuk menjaubkan masyarakat dari ide khilafah. Mereka kemudian menyimpangkan konsep khilafah dan melakukan ‘monsterisasi’ khilafah. Mereka berupaya menanamkan ketakutan atau paling tidak keengganan terhadap ide khilafah. Caranya dengan mengaitkan isu tersebut dengan terorisme, aksi kekerasan, dan kejahatan.*” Makna yang dapat ditangkap dari penjelasan tersebut adalah khilafah yang diperjuangkan oleh HTI berbeda dengan khilafah ISIS. Kejahatan-kejahatan, dengan demikian, tidak bisa disandingkan dengan gagasan khilafah HTI.

Penggunaan kata “monsterisasi” menegaskan diferensiasi yang diharapkan bahwa HTI berbeda dengan ISIS dalam berkhilafah. Dengan menggunakan kata monsterisasi muncul pengertian bahwa telah terjadi pembohongan publik mengenai gagasan khilafah. Dengan kemunculan ISIS, tidak lantas ide khilafah harus ditolak karena keduanya berbeda. Penegasan tersebut mengindikasikan ketakutan jika kekerasan yang dipertontonkan ISIS akan berpengaruh terhadap pandangan publik umum mengenai gagasan khilafah yang juga menjadi kunci perjuangan HTI dalam pergerakan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa gerakan ISIS telah memakan banyak korban. Kekejian yang diperlihatkan ketika mengeksekusi sandera, baik dari Jepang, Yordania, dan Amerika menunjukkan level kebiadaban yang memuakkan. Meskipun menolak khilafah yang diplokamirkan oleh Abu Bakar al-Baghdady namun mereka masih mengajukan khilafah versi mereka.

Perdebatan mengenai urgensi pendirian khilafah lantas mengemuka dan seperti tiada habisnya. Ilmuan dan cendekiawan mencoba merumuskan kembali dan menawarkan pandangan mereka mengenai hal pelik ini. Di samping sebagai benteng pertahanan dalam arus deras globalisasi, adu argumentasi tentang perkara ini menjadi titik sentral yang tidak boleh dilalaikan. Sumbangsih wacana tersebut, setidaknya, bisa mengintrodusir arus informasi yang terus menerus diinformasikan berbagai media.

Respons juga datang dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang selama mendengarkan khilafah. Hizbut Tahrir Indonesia, dalam laman hizbut-tahrir.or.id (4/10//2015), menolak deklarasi khilafah yang dikumandangkan oleh Abu Bakar al-Baghdady dan mendapuk dirinya sebagai khalifah. Ismail Yusanto, juru bicara HTI, menyatakan ISIS tidak memenuhi kriteria untuk mendirikan kekhalifahan Islam. Menurutnya, ada empat komponen yang harus dipenuhi untuk mendirikannya.

Pertama, khilafah Islam harus memiliki wilayah yang otonom, sedangkan ketika mendeklarasikan kekhalifahan mereka menduduki sebagian daerah Irak dan Syuriah. Kedua, soal keamanan. Menurutnya, khilafah Islam semestinya memiliki keamanan yang berada di tangan muslim. Sedangkan kini, berada di dua wilayah berbeda, Irak dan Syuriah. Ketiga, masih menurut Yusanto, ISIS dirasa tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan syari'at Islam secara menyeluruh. Secara spesifik dijelaskan bahwa tidak adanya tawaran sistem politik, ekonomi, dan lain-lain menjadi alasan utamanya atas ketidak-absahan kekhalifahan tersebut. Keempat, pengangkatan pemimpin ISIS dinilai tidak memenuhi syarat, seperti *baligh* (dewasa), berakal, muslim, mampu dan lain-lain.

Maka dari itu, diskursus urgensi khilafah menguat kembali. Satu sisi menginginkan pendirian khilafah dengan beberapa catatan, sebagaimana disampaikan oleh Islam Yusanto, juru bicara HTI. Sedangkan kalangan lain, misalkan pesantren, menolak gagasan khilafah

dan transnasionalisme Islam. Perdebatan tersebut terus menyala dan, oleh karenanya, mesti mendapatkan perhatian.

3. Tentang Isu Terhadap Lingkungan

Gagasan mengenai imajinasi khilafah juga terlihat dari beberapa tulisan yang membahas tentang isu lingkungan. Mengenai isu lingkungan, ditemukan beberapa tulisan terkait. Pertama, yang ditulis oleh Prof. Dr. Fahmi Amhar. Dalam tulisan “Ditangkal dan Tawakal, Inilah Cara Khilafah Mensikapi Bencana” (21/1/2014), diperlihatkan fakta bahwa di sebagian kota di Indonesia masih kerap dilanda banjir. Di Jakarta, misalnya, ibukota negara Indonesia, seringkali dilanda banjir.

Tak hanya soal banjir, Indonesia juga dihantui oleh beberapa potensi bencana alam lain yang siap menerjang. Secara detail dijelaskan, “*Kita berada tepat di batas-batas lempeng Eurasia, Hindia, Australia, dan Pasifik. Kita punya gunung api aktif. Semua berpotensi gempa, longsor, tsunami, dan erupsi yang mampu menghancurkan kehidupan dalam seketika. Kita juga berada di persimpangan angin dan arus laut antara Asia—australia dan antara Hindia-Pasifik.*”

Imajinasi mengenai khilafah kemudian diperlihatkan para paragraf berikutnya. Menurut Fahmi Amhar, daulah islam, dulunya, yang terbentang dari Timur Tengah dan Afrika Utara juga mempunyai potensi bencana, utamanya rawan akan kekeringan. Lembah sungai Nil di Mesir termasuk salah satu sungai yang rawan akan kekeringan. Berdasarkan keterangannya, para penguasa Muslim telah membangun bunker untuk tempat makanan. Di sana disimpan berbagai macam makanan, seperti gandum, kurma, minyak goreng, dan lain sebagainya.

Dalam tulisan lain, “Cara Khilafah Mengatasi Bencana Alam” (22/12/2014) disebutkan dua langkah yang bisa dilakukan. Pertama, langkah preventif. Kedua, langkah kuratif. Langkah preventif meliputi upaya-upaya agar tidak terjadi banjir, seperti memastikan terserapnya air ke dalam tanah, membangun pondasi di lereng gunung sebagai penahan. Sementara itu, langkah kuratif dilakukan saat terjadi bencana. Disebutkan bahwa (1) khalifah akan menyampaikan pidato untuk mengingatkan rakyat, agar bersabar; (2) memberikan penangan yang cepat pada korban bencana; dan (3) menyediakan alokasi anggaran untuk bencana, baik dari zakat maupun kekayaan umum lain.

Dalam tulisan yang berbeda, “Cara Khilafah Mengatasi Kekeringan” (25 Agustus 2015) juga disebutkan bagaimana tata cara mengatasi kekeringan. Dijelaskan bahwa Indonesia, yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, memiliki potensi terjadi kekeringan. Setelah menjabarkan tentang potensi kekeringan tersebut, penulis, Hafidz Abdurrahman, memaparkan bagaimana khilafah akan mengatasi bencana kekeringan.

Isyarat imajinasi mengenai khilafah terlihat ketika sang penulis menjelaskan bagaimana khilafah akan mengatasi masalah kekeringan. Menurutnya, jalan keluar yang akan ditempuh oleh khilafah adalah sesuatu hal yang berbeda. Dia memetakan dua hal, teknis dan non-teknis. Namun, hal-hal yang disebutkan seperti bukan hal baru sama sekali atau identik.

Misalnya, dalam konteks yang pertama, yaitu di bagian teknis, dia menjelaskan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memetakan iklim dan kondisi cuaca. Hasil kajian tim yang dibentuk ini akan menjadi rekomendasi yang diberikan kepada khalifah atau lembaga terkait. Hal seperti yang dijelaskan tersebut bukan hal yang unik. Dan, tanpa dengan disertai penamaan khilafah pun, akan dengan sangat mudah mendapatkan akses ke pihak terkait.

Detail informasi yang disajikan yaitu pada Paragraf 13, “*secara non-teknis, khalifah juga akan memimpin umat Islam untuk memohon kepada Allah SWT, dengan mendekati diri kepada Allah, meninggalkan maksiat, baik melalui salat istisqa’, anjuran berdoa, mendoakan dan minta didoakan agar Allah menurunkan hujan*”. Rangkaian kata “khalifah juga akan memimpin umat Islam” menandakan satu harapan atas hal yang belum terjadi.

Sebelumnya juga disampaikan bagaimana tim dari khilafah tersebut akan melakukan kajian terhadap bencana kekeringan sesuai anjuran khalifah, sebagaimana detail berikut pada paragraf 5, “*Hasil kajian, riset, dan rekomendasi tim inilah yang akan dilakukan oleh khalifah atau badan terkait. Dari hasil kajian ini, khusus kasus kekeringan, misal ditemukan, bahwa faktor penyebab kekeringan itu, adalah (1) adanya penyimpangan iklim; (2) adanya gangguan keseimbangan hidrologis; (3) kekeringan agronomis*”.

Metode Imajinasi Ummah Dalam Hizbut-Tahrir.or.id

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai konstruksi wacana *ummah* atau *khilafah* dalam laman *hizbut-tahrir.or.id*. Sangat jelas terlihat bagaimana narasi yang dibangun untuk menghadirkan kembali gagasan negara Islam dalam skala global melalui sejarah. Sebagaimana dibahas sebelumnya, setiap kali membahas suatu persoalan, mereka lantas memberikan solusi bahwa yang bisa menyelesaikan permasalahan adalah dengan berdirinya khilafah atau menyatukan *ummah*. Namun, tidak sekadar itu, mereka menyajikan narasi-narasi sejarah untuk melegitimasi klaim tersebut.

Penonjolan Identitas Ke-Islam-an

Dalam *hizbut-tahrir.or.id*, identitas yang dibentuk adalah identitas keagamaan (baca: ke-islaman) berdasarkan apa yang disebut sebagai fakta sejarah. Persoalan-persoalan yang mengemuka dewasa ini, di Indonesia, dikonstruksi sedemikian rupa dan diproyeksikan dengan kejadian masa lalu yang serupa. Setelah itu, kejadian di masa kini diibaratkan sama

dengan fakta masa lalu dan diumpakan bisa diselesaikan dengan satu jalan. Yakni dengan cara mendirikan negara khilafah. Wacana khilafah sebagai solusi ini merupakan bingkai besar yang coba dipropagandakan dalam setiap narasi teks yang ada.

Mustafa Aydin dan Sinem Acikmese, dalam *Identity-based Security Threats in Globalized World: Focus on Islam*, menjelaskan bahwa identitas bukan sebagai satu hal yang terberi (*a given-natural phenomenon*), namun merupakan hasil identifikasi diri (Aydin & Acikmese, 2008). Dalam konteks individu, seseorang berusaha membentuk identitas kediriannya sehingga bisa mempertahankan dari segala macam ancaman dari luar. Sementara itu, dalam konteks kelompok, juga mengonstruksi identitas mereka dalam rangka melanjutkan keberlangsungan eksistensialnya.

Sebagai dampak dari ideologi, “identitas pribadi” dan “identitas kelompok” memiliki batas yang sangat tipis, bahkan bisa dikatakan keduanya saling terkait satu dengan yang lain. Seseorang membentuk identitas pribadinya dengan mendasarkan pada gagasan yang ditawarkan oleh kelompok di mana ia berafiliasi. Dalam waktu bersamaan, kelompok tersebut merupakan manifestasi dari sekumpulan individu yang saling berjejaring dan memiliki konsepsi yang sama mengenai satu hal. Saat individu ataupun kelompok mendapatkan ancaman eksistensi mereka, maka identitas mereka menjadi tumpuan utama. Seorang individu mempertahankan diri berdasarkan psikologi sosial, sementara itu kelompok menghubungkan keterancaman mereka dalam skala yang lebih luas lagi.

Wacana yang dihembuskan hizbut-tahrir.or.id mewakili psikologi kelompok dalam bingkai wacana internasional mengenai bersatunya *ummah*. Mereka menganggap neoliberalisme sebagai ancaman nyata bagi kemungkinan berdirinya khilafah dalam satu komando kepemimpinan di seluruh dunia. Karena neoliberalisme dilihat sebagai produk pemikiran yang tidak memiliki hubungan dengan doktrin dalam Islam dan dinilai *western-oriented*. Sehingga penolakan yang dibingkai dapat dibaca dengan dua perspektif, pertama; hal itu dilakukan untuk penegasan identitas diri, dan sekaligus, kedua; sebagai upaya untuk meyakinkan konstituen mengenai kemungkinan terjawabnya persoalan dengan asumsi khilafah berdiri dan sang khalifah diharapkan dapat menyelesaikan persoalan terkait.

Perlu ditegaskan pula bahwa identitas kelompok yang dibangun dalam laman *hizbut-tahrir.or.id* adalah identitas ke-islaman yang meyakini segala persoalan bisa diselesaikan dengan mendirikan khilafah sebagai solusi. Keyakinan tersebut sangat kuat memengaruhi argumentasi yang dibangun. Bidang kesejarahan yang dipaparkan dalam sejumlah analisa memperlihatkan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di era kontemporer ini bisa dituntaskan dengan jalan pendirian khilafah. Karena, sesuai argumentasi teologisnya, khilafah adalah suatu kewajiban yang mesti diperjuangkan oleh semua orang Islam.

SIMPULAN

Tatanan kehidupan modern mendapat tantangan dalam kemasan baru terkait dengan tata kelola dunia. Konsep negara-bangsa, kerajaan, dan sosialisme dipertanyakan keabsahannya oleh pengusung gagasan *ummah* atau *khilafah*. Ketidakpuasan terhadap kinerja perpolitikan internasional dan lokal menjadikan wacana ini terus mendapatkan sorotan. Hizbut Tahrir Indonesia, yang merupakan cabang organisasi transnasional Hizbut Tahrir hasil prakarsa Taqiyuddin al-Nabhani, berupaya untuk menggelorakan gagasan khilafah.

Dalam konteks modern, khususnya di Indonesia, pandangan tersebut terbentur dengan berbagai fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara-bangsa dan Pancasila. Belum lagi kompleksitas persoalan yang, sepertinya, sangat disimplifikasi sebagai persoalan biasa yang dapat diselesaikan dengan cara lama, yang belum tentu kompatibel dengan zaman sekarang. Simplikasi segala persoalan dengan mengandaikan semuanya bakal terselesaikan dengan berdirinya khilafah hanya menegaskan keabaian terhadap peran individu dalam mengambil segala bentuk kebijakan. Klaim khalifah sebagai utusan Tuhan, yang terpilih secara Islam nantinya, justru menghadirkan persoalan baru. Adalah bahwa sejauh mana otoritas tersebut dapat dipatuhi oleh pengikut dan juga dengan tolok ukur apa otoritas kepemimpinan yang diklaim sebagai titah Tuhan tersebut legetimatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, M. (2011). *From Revolution to "Refolution" A Study of Hizb al Tabrir, Its Changes and Trajectories in the Democratic Context of Indonesia (2000-2009)*. Retrieved from <http://researcharchive.vuw.ac.nz/handle/10063/4453>
- Akram, E. (2007). Muslim Ummah and its Link with Transnational Muslim Politics, *Vol. 46, No. 3*, 381–415.
- Arkoun, M. (2002). Sejarah sebagai Ideologi Legetimasi: Pendekatan Perbandingan dalam Konteks Islam dan Eropa. In *Dialektika Peradaban* (1st ed., pp. 31–47). Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Aydin, M., & Acikmese, M. S. (2008). Identity-based security threats in a globalized world: focus on Islam. In *Globalization and Environmental Challenges* (pp. 413–420). Springer. Retrieved from http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-75977-5_28
- Dabashi, H. (1989). *Authority in Islam: from the rise of Muhammad to the establishment of the Umayyads*. New Brunswick: Transaction Publ.
- Fuller, G. E., & Lesser, I. O. (1995). *A Sense of Siege: The Geopolitics of Islam and the West* (3rd ed.). United State: Westview Press.

- Gee, J. (2006). *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method* (2nd ed.). London: Routledge.
- Hasan, N. (2012). *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori* (1st ed.). Yogyakarta: SUKA-Press.
- Hefner, R. W. (2005). *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hodgson, M. G. S. (2002). *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*. Jakarta: Paramadina.
- Jamilah, S. (2015). Gerakan Hizbut Tahrir di Kota Pare-Pare (Membaca Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani). *Jurnal Diskursus Islam*, 3(1). Retrieved from http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/192
- Jindan, K. I. (1979). *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah* (Ph.D.). Georgetown University, United States -- District of Columbia. Retrieved from <http://search.proquest.com.ezproxy.ugm.ac.id/docview/302905904/abstract/951D232D73AB4E9CPQ/1>
- Jurdi, S. (2006). *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan antara Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhtadi, B. (2009). The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 37(4), 623–645. <https://doi.org/10.1163/156853109X460219>
- Pohan, R. (2014). *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah* (1st ed.). Yogyakarta: Kaukaba.
- Rijal, S. (2011). Crafting Hizbiyyin in Contemporary Indonesia: Da'wah and Recruitment of Hizbut Tahrir Indonesia in South Sulawesi. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 5(1), 130–152.
- Rodhi, M. (2008). *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tabrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah* (1st ed.). Bangil: Al-Izzah.
- Springer, D. R., Regens, J. L., & Edger, D. N. (2009). *Islamic radicalism and global jihad*. Washington, D.C: Georgetown University Press.
- Tapscott, D. (2009). *Grown up digital how the net generation is changing your world*. New York: McGraw-Hill. Retrieved from <http://www.books24x7.com/marc.asp?bookid=14311>
- Wahid (ed), A. (2009). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: LibForAll Foundation.

Website:

<http://www.jawapos.com/read/2015/11/09/9888/-warga-pekanbaru-ingin-gabung-isis-kapolres-pikiran-mereka-dicuci/2> diakses pada 10 November 2015

<http://www.jawapos.com/read/2015/11/09/9845/pejabat-batam-gabung-isis-mendagri-ingatkan-pentingnya-deteksi-din> diakses pada 10 November 2015

<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/14240/bin-deteksi-sudah-50-wni-gabung-isis> diakses pada 10 November 2015

<http://hizbut-tahrir.or.id/2014/08/12/hti-isis-tak-penuhi-kriteria-syariat-dirikan-khilafah/>, diakses pada 10/9/2015

<http://hizbut-tahrir.or.id/2014/08/06/jubir-hti-pemerintah-harus-sikapi-isis-dan-khilafah-secara-proporsional/>, diakses pada 10/4/2015

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker#.Vqc_0Z7GpDY (diakses pada 10/11/2015)

<http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/11/cara-khilafah-mengendalikan-harga/>, diakses pada 10/9/2015

<http://hizbut-tahrir.or.id/2015/01/10/cara-khilafah-menjaga-kekayaan-negara-dari-tangan-asing/>, diakses pada 10/9/2015

<http://hizbut-tahrir.or.id/2015/05/06/kebijakan-khilafah-terhadap-perusahaan-asing/>, diakses pada 10/9/2015

<http://hizbut-tahrir.or.id/2015/05/25/kebijakan-khilafah-dalam-pembangunan-infrastruktur/>, diakses pada 10/9/2015

<http://hizbut-tahrir.or.id/2015/06/03/khilafah-mampu-membendung-neoliberalisme-dan-neoimperialism/>, diakses pada 10/9/2015

<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/01/09/cara-khilafah-menanggulangi-terorisme/>, diakses pada 10/9/2015

<http://hizbut-tahrir.or.id/2014/08/13/khilafah-ajaran-islam-bukan-kejahatan/>, diakses pada 10/9/2015

<http://hizbut-tahrir.or.id/2014/01/21/ditangkal-dan-tawakal-inilah-cara-khilafah-mensikapi-bencana/>, diakses pada 10/9/2015

<http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/22/cara-khilafah-mengatasi-bencana-alam/>, diakses pada 10/9/2015

<http://hizbut-tahrir.or.id/2015/08/25/cara-khilafah-mengatasi-kekeringan/>, diakses pada 10/9/2015

<http://hizbut-tahrir.or.id/2015/11/12/bagaimana-khilafah-menyelesaikan-kasus-freeport/>, diakses pada 10/9/2015

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3APengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker#.Vqc_0Z7GpDY, diakses pada 10/11/2015

